BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2023

PERBUP KAB.KUTAI KARTANEGARA NO 43, BD NOMOR 43, SETDA : 32 HLM
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 Tentang perangkat Daerah tahun 2016 nomor 144;Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021;Peraturan Menteri nomor 7 tahun 2022;Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan ; susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara,Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yangb selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintah berbasis elektrik;dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud BPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan; pelaksanaan program kerja dan administrasi;Susunan organisasi BPKAD terdiri atas Kepala Badan Sekretariat bidang anggaran bidang perbendaharaan bidang akuntansi bidang aset kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis daerah;pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi dibidang keuangan khususnya subbidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah;penyusunan laporan di bidang keuangan dan pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;ketentuan mengenai pembentukan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada BPKAD diatur dengan peraturan Bupati.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 11 Oktober 2023

- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada BPKAD (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.